

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2010 - 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

**BENGKALIS
2011**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 ini telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Bengkalis yakni dari tahun 2010 hingga 2015, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis ini menyajikan rencana program dan kegiatan Bappeda setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Dalam renstra Bappeda ini juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bengkalis pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bengkalis, 22 Desember 2011

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198903 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT KEPUTUSAN TENTANG RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan	1-5
1.4. Sistematika Penulisan	1-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	2-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda	2-1
2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkalis	2-6
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis	2-6
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	2-7
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	3-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	3-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	3-2
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi	3-7
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-8
3.5. Isu-Isu Strategis	3-10
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN...	4-1
4.1. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bengkalis	4-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	4-2
4.3. Strategi dan Kebijakan	4-4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	5-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SESUAI RPJMD	6-1
BAB VII PENUTUP	7-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	4-2
Tabel IV.2 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Bengkalis	4-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah telah memberikan semangat dan kekuatan bagi daerah untuk terus menggali, mengembangkan dan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya. Kewenangan yang dimiliki daerah secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadikan daerah sebagai subjek utama pembangunan, dimana domain daerah jauh lebih luas dibandingkan sebelum era otonomi daerah.

Kewenangan dan keleluasaan yang diberikan kepada daerah termasuk dalam penataan perangkat dan kelembagaan daerah melalui reformasi birokrasi guna mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjadikan prakarsa dan aspirasi masyarakat sebagai gagasan utama sekaligus kekuatan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Semangat reformasi telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur daerah dengan tuntutan peningkatan akselerasi pembangunan dan mutu pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perumusan visi dan misi organisasi (SKPD) yang memuat sejumlah strategi dan kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas berdasarkan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis merupakan instrumen utama yang memiliki tugas dan fungsi menyukseskan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkalis secara lebih rinci berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk itu dirumuskanlah suatu Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda dalam periode lima tahun (2010 – 2015) berdasarkan periodisasi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015. Renstra Bappeda disusun sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Bappeda dengan memuat pendanaan indikatif setiap tahunnya sampai berakhir periode rencana yakni tahun 2015.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015;
31. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 disusun dengan maksud :

- a. Menjadi acuan resmi bagi seluruh aparatur Bappeda dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015.
- b. Menyiapkan suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 adalah tersusunnya perencanaan SKPD yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

2.2 Sumber Daya Bappeda

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bengkalis

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang mempunyai tugas sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis, yakni melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Eselon II satu orang, Eselon III lima orang dan Eselon IV sebelas orang dengan pembagian sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Data dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Administrasi Umum;
3. Bidang Fisik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Prasarana Fisik
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan
4. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Usaha Perekonomian, Pertambangan dan Energi;
 - b. Sub Bidang Pertanian;
5. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Budaya;
6. Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Aparatur dan SDM;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda
Kepala Bappeda mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008.
 - b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Bidang-bidang, perumusan, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan administrasi umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi perencanaan program, keuangan dan administrasi umum;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Fisik

Bidang Fisik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana fisik, tata ruang dan lingkungan yang meliputi bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Fisik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program pembangunan daerah di bidang fisik, yang meliputi bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika dan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika dan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik;

- d. Pelaksanaan, pencermatan proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang fisik;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian yang meliputi bidang pertambangan dan energi, pertanian, kelautan, perindustrian, dan perdagangan, koperasi UMKM dan pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program pembangunan daerah di Bidang Perekonomian yang meliputi bidang pertambangan dan energi, pertanian, kelautan, perindustrian, dan perdagangan, koperasi UMKM dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian yang meliputi bidang pertambangan dan energi, pertanian, kelautan, perindustrian, dan perdagangan, koperasi UMKM dan pariwisata;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian;
- d. Pelaksanaan, pencermatan proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Perekonomian;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sosial dan Budaya yang meliputi Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program pembangunan daerah di Bidang Sosial dan Budaya, yang meliputi Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya;
- b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sosial dan Budaya yang meliputi Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya;
- d. Pelaksanaan, pencermatan proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Sosial dan Budaya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas pokok pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang meliputi Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, yang meliputi Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang meliputi Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Pelaksanaan, pencermatan proses penyusunan RAPBD dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkalis

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis hingga September 2011 berjumlah 68 Orang, yang terdiri dari 63 orang PNS dan 5 orang Tenaga Sukarela. PNS yang telah memiliki pangkat/golongan IV sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang dengan Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) dan 6 orang dengan pangkat/golongan Pembina (IV/a).

Untuk PNS yang memiliki pangkat/golongan III berjumlah 33 Orang, yang terdiri dari 2 orang dengan pangkat/golongan Penata TK.I (III/d), 8 orang Penata (III/c), 9 orang Penata Muda TK.I (III/b) dan 14 orang dengan pangkat/golongan Penata (III/a). Sedangkan untuk PNS yang memiliki pangkat/golongan II berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 3 orang dengan pangkat/golongan Pengatur TK.I (II/d), 10 orang Pengatur Muda TK.I (II/b) dan 10 orang dengan pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a).

Dilihat dari latar belakang pendidikan, terdapat 8 orang Pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis yang telah berpendidikan S2, 27 orang S1, dan 28 orang yang berpendidikan SMA. Sedangkan untuk tenaga sukarela terdapat 2 orang yang berpendidikan S1 dan 3 orang yang berpendidikan SMA. Selanjutnya PNS yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) II sebanyak 4 orang, Diklatpim III sebanyak 5 orang dan Diklatpim IV sebanyak 8 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja bidang perencanaan daerah dan analisa pencapaian kinerja, baik berupa evaluasi kinerja program maupun evaluasi kinerja kegiatan di Bappeda Kabupaten Bengkalis menunjukkan hasil yang sangat baik. Keberhasilan ini merupakan cerminan adanya sinergi setiap unsur dalam subsistem Bappeda dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan saling berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik. Ada komitmen dan rasa tanggung jawab setiap elemen dalam Bappeda mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur staf dalam melaksanakan tugas

yang diberikan sehingga segala tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dilihat dari aspek keuangan, keberhasilan kinerja Bappeda sebagai pencapaian visi dan misi Bappeda yang telah ditetapkan menunjukkan grafik yang sangat baik. Kondisi ini sejalan dengan realisasi capaian prioritas pembangunan daerah sesuai aspirasi dan keinginan masyarakat lintas sektor dan lintas wilayah. Target perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan asumsi dan dukungan dana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis yang dialokasikan pada Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya sesuai prioritas rencana strategis Bappeda.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Dinamika perubahan sosial masyarakat memberikan pengaruh terhadap orientasi kebutuhan publik yang semakin kompleks dan beragam. Dalam konteks pembangunan daerah ada semacam tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah memberikan pelayanan yang lebih maksimal sebagai imbalan atas meningkatnya kontribusi masyarakat terhadap sumber daya daerah seperti pembayaran pajak dan sejenisnya. Oleh karena itu pemerintah dalam konteks kekinian diharapkan lebih peka dan agresif untuk memahami tuntutan kebutuhan sosial dan ekonomi.

Daya kritis masyarakat dewasa ini menjadikan pemerintah harus bijak membangun keseimbangan antara pemanfaatan potensi yang ada dengan manfaat yang dihasilkan. Oleh sebab itu fungsi perencanaan menjadi sangat strategis guna memberikan rasa optimisme atas pengalokasian sumber daya dan asumsi pencapaian visi dan misi daerah. Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bengkalis yang toleran dalam kemajemukan adalah modal sosial (*social capital*) yang sangat berharga sekaligus sebagai aset yang harus dijaga melalui prinsip-prinsip perencanaan yang adil, transparan dan partisipatif.

Pembangunan sedapat mungkin menghindari menurunnya kepercayaan publik, hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis. Interaksi sosial lintas wilayah, dinamika politik daerah,

kesepahaman ide dan gagasan, kultur dan tingkat pendidikan dan berbagai faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap peletakkan kerangka rencana strategis Bappeda.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan agar daerah menyusun rencana pembangunan yang komprehensif, terukur dan terarah sehingga dapat menggambarkan capaian keberhasilan pembangunan dalam berbagai aspek. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran dan harapan masyarakat kepada Bappeda untuk menjadi instansi yang profesional dan berwibawa.

BAB III

ISSU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis melaksanakan fungsi koordinasi lintas sektoral di semua bidang terutama dalam aspek perencanaan mulai tahapan proses penyusunan, pengendalian sampai evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan Sumber Daya Aparatur Perencana dari yang paling dasar, yakni memahami semua tugas dan fungsi Bappeda sampai pada persoalan teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah koordinasi bidang-bidang di Bappeda.

Pemahaman ini perlu mengingat sering dan akan selalu ada argumentasi dari semua SKPD terkait usulan program dan kegiatan yang mereka sampaikan yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek perencanaan umum dan kaitannya dengan sasaran prioritas daerah seperti Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis dan arahan-arahan lain baik dari Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai kesatuan subsistem perencanaan, Bappeda dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan mengalami beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus untuk segera diselesaikan secara bertahap dalam periodisasi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 – 2015 ini. Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1. Ketidakseimbangan antara kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan beban kerja.
2. Struktur organisasi kerja Bappeda membutuhkan penguatan dari beberapa sisi guna lebih fokusnya penyelesaian tugas-tugas rutin dan pelaksanaan fungsi Bappeda secara lebih efisien.

3. Kedisiplinan aparatur yang masih perlu terus ditingkatkan.
4. Penerapan *reward and punishment* yang belum maksimal.
5. Kuantitas dan Kualitas SDM (pendidikan formal dan teknis) yang belum seimbang dengan keluaran yang diharapkan.
6. Hasil kajian/penelitian yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
7. Fasilitas kantor yang tidak lagi representatif untuk melakukan aktifitas pekerjaan secara lebih baik.
8. Fasilitas transportasi yang belum maksimal untuk menunjang mobilitas pekerjaan dengan cakupan wilayah geografis Kabupaten Bengkalis yang masih cukup sulit.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan potensi Sumber Daya Alam dalam Posisi strategis wilayah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang telah melalui proses teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011, yakni:

“Tercapainya Masyarakat Yang Unggul, Sejahtera, Mandiri Dan Bertaqwa Dengan Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Salah Satu Daerah Otonom Terbaik di Indonesia Tahun 2015”

Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
2. Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.

3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
4. Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Guna mendukung pencapaian kelima misi di atas disiapkan grand strategy **pengembangan empat kawasan** sebagai konsep yang didasari kekhususan wilayah yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik dilihat dari potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun kondisi geografis dan geoteknis, keempat kawasan tersebut adalah:

1. Kawasan Pusat Pendidikan dan Agrobisnis di Pulau Bengkalis;
2. Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
3. Kawasan Pariwisata dan Agrobisnis di Pulau Rupat;
4. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

Sebagai upaya percepatan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD 2010 -2015 juga menetapkan grand strategy **enam jaminan kepada masyarakat** yang merupakan sektor prioritas yang terdiri dari:

1. Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;
3. Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;
4. Jaminan akses infrastruktur dasar;
5. Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan

daerah;

6. Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada pencapaian misi keempat, yaitu meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan dan misi kelima, yaitu mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dukungan Bappeda terhadap pelaksanaan kedua misi tersebut adalah dalam konteks perencanaan secara umum dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja daerah lima tahun ke depan khususnya indikator yang menggambarkan sejauh mana kedua misi tersebut dapat dilaksanakan secara baik guna mencapai Visi daerah tahun 2015. Untuk itu Bappeda secara konsisten telah merencanakan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD hingga tahun 2015 yang secara rinci dan jelas akan dipaparkan pada Bab V.

Berdasarkan telaahan di atas terdapat dua faktor yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi daerah, yakni faktor kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah melakukan analisis terhadap keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang ada pada Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan kelemahan adalah melakukan analisis dan mengidentifikasi faktor yang akan mengurangi ataupun melemahkan kemampuan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, sehingga perlu upaya untuk memberikan perhatian yang lebih guna mengatasi kelemahan tersebut.

1. Faktor penghambat (tantangan dan kelemahan)

Terdapat beberapa tantangan dan kelemahan yang dimiliki Bappeda saat ini yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi daerah, antara lain:

- a. Terbatasnya Sumber Daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan;
- b. Beban kerja yang cukup besar;
- c. Adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dengan jumlah dan kemampuan aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. Distribusi pegawai yang tidak merata sesuai kemampuan dasar dan kemampuan teknisnya;
- e. Pemberian reward and punishment yang belum maksimal;
- f. Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal.
- g. Kualitas sarana kantor yang belum memadai.

2. Faktor pendorong (peluang dan kekuatan)

Beberapa peluang dan kekuatan yang dapat mendorong Bappeda dalam pencapaian visi dan misi daerah, antara lain:

- a. Ketersediaan sumber pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya menjadi gambaran telah sesuai antara rencana dan pelaksanaan kegiatan;
- c. Rencana pengembangan sumber daya aparatur perencana yang disusun secara baik sesuai dengan kebutuhan terutama untuk pendidikan khusus perencanaan pembangunan daerah (PPD);
- d. Tingkat koehesifitas atau kekompakan seluruh pegawai Bappeda dalam melaksanakan tugas menjadi kekuatan yang sangat besar;
- e. Tingginya animo aparatur Bappeda untuk terus meningkatkan kemampuan tekhnis di bidang perencanaan;

- f. Aparatur Bappeda memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan;
- g. Landasan hukum dan kelembagaan yang cukup jelas.

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi

3.3.1. Renstra Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) selaku Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010 – 2014. Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Untuk itu Bappenas menetapkan visi sesuai Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010 – 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2010, yaitu *“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi Bappenas, yang terdiri dari:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun pemerintah pusat dengan daerah;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Bila dilihat visi dan misi Bappenas di atas, sangat berhubungan erat dengan visi dan misi Bappeda Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015 karena substansi visi dan misi Bappeda sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni melakukan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Terkait faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kementerian PPN/Bappenas telah melakukan langkah-langkah serupa dalam hal mempertegas komitmen perencanaan yang juga dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis.

3.3.2. Renstra Bappeda Provinsi Riau

Bappeda Provinsi Riau selaku SKPD penanggung jawab bidang perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi menjadi rujukan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk menyusun rencana strategis karena secara fungsi koordinasi perencanaan pada level Kabupaten harus melakukan koordinasi dengan provinsi selaku koordinator pembangunan daerah. hal ini mepertegas fungsi dan kedudukan Gubernur Riau selaku perwakilan pemerintah di daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Bappeda Provinsi Riau sebagai salah satu SKPD di Provinsi Riau turut mensukseskan pencapaian visi dan misi Provinsi Riau tahun 2009 – 2013, yakni “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Mapan dan Pengembangan Budaya Melayu Secara Proporsional Melalui Kesiapan

Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis”. Berbagai pendekatan terutama dalam upaya mencapai kinerja yang terukur.

Dalam konteks ini Bappeda Kabupaten Bengkalis secara umum akan memprioritaskan pada perencanaan dan kajian khususnya mendukung pembangunan infratsruktur, pendidikan dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu persoalan peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda juga menjadi komitmen baik di Provinsi Riau Maupun di Kabupaten Bengkalis.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004. Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009.

Praktis dengan adanya pemekaran tersebut terjadi perubahan terhadap struktur wilayah, baik luas, pemanfaatan dan fungsi secara spasial (keruangan). Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi agar apa yang direncanakan ke depan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, namun juga sejalan dengan peruntukan kawasan. Hasil revisi telah sampai pada persetujuan substantif Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan direncanakan pada tahun 2012 Peraturan Daerahnya akan diajukan untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Bengkalis.

Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini adalah 777.393,02 Ha dan dibagi menjadi dibagi menjadi dua kawasan menurut pola ruang, yaitu Kawasan Lindung seluas 226.240,74 Ha (31,12%) dan Kawasan budi daya seluas 551.152,28 Ha (68,88%). Arah pola ruang nasional di Kabupaten Bengkalis terdiri dari kawasan lindung nasional dan kawasan andalan Duri – Dumai dan

sekitarnya, sedangkan arahan struktur ruang nasional terdiri dari sistem perkotaan nasional dan sistem infrastruktur nasional.

Secara umum kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk:

1. Pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi;
2. Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan kepulauan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional;
3. Pengembangan kawasan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah;
5. Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana;

Bila dilihat dari aspek kebijakan penataan ruang di atas, RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015 telah sesuai karena rencana pengembangan wilayah Kabupaten Bengkalis yang terbagi menjadi empat kawasan telah mempertimbangkan pola, arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis. Program dan kegiatan Bappeda sebagaimana tertuang dalam Renstra ini juga telah sesuai dengan RTRW dimaksud.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan *Quick Appraisal Method* terdapat 9 (sembilan) isu lingkungan strategis Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Masih luasnya lahan kritis sebagai akibat adanya pembalakan liar dan tekanan penduduk semakin tinggi terhadap hutan dan lahan untuk penggunaan pertanian atau perkebunan serta manajemen pengelolaan lahan yang buruk;
2. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya sektor permukiman, pertanian, industri dan kegiatan usaha lainnya;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;

4. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau;
5. Meningkatnya jumlah produksi sampah seiring bertambahnya jumlah penduduk;
6. Penyusutan keanekaragaman hayati akibat perubahan fungsi hutan;
7. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan akibat rusaknya hutan;
8. Meningkatnya kerusakan pantai akibat abrasi;
9. Masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga mencemari udara dan menimbulkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

Dari sembilan isu lingkungan di atas, Bappeda Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda 2010 – 2015, antara lain: Penyusunan masterplan di empat kawasan Kabupaten Bengkalis, sosialisasi RTRW, koordinasi dengan stakeholders khususnya di bidang lingkungan, bekerjasama dengan berbagai pihak dalam hal pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut.

3.5. Isu-isu Strategis

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2014 tidak lepas dari konteks isu-isu strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, hal ini karena secara langsung maupun tidak langsung semua aspek perencanaan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Beberapa isu strategis yang diidentifikasi akan mempengaruhi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah hingga tahun 2015, antara lain :

1. Wacana pemekaran wilayah baik desa maupun kecamatan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan khususnya keseimbangan antar kawasan secara spasial (keruangan);
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia masih menjadi isu utama dalam pembangunan lima tahun ke depan;
3. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar kawasan menjadi fokus pembangunan infrastruktur utama Kabupaten Bengkalis;

4. Penataan birokrasi daerah baik penerimaan, penempatan, pendidikan maupun *reward and punishment*;
5. Rencana perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Bengkalis diprediksi juga berpengaruh terhadap kinerja daerah terutama keseimbangan dan distribusi tugas/fungsi masing-masing SKPD;
6. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian baik di Bappeda maupun SKPD teknis lainnya;
7. Beberapa kebijakan nasional juga berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah ke depan, antara lain: kebijakan mengenai harga BBM, kebijakan reformasi birokrasi dan penataan pegawai daerah dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi BAPPEDA

Visi Bappeda Kabupaten Bengkalis, adalah :

“Terwujudnya Rencana Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang Akurat, Integratif, Aspiratif dan Partisipatif untuk Mendukung Pencapaian Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2015”.

Misi Bappeda Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Visi yang dirumuskan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang sosial dan budaya.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan aparatur.

Untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, maka perlu dikembangkan budaya kerja positif dengan mengadopsi beberapa nilai-nilai utama guna mewujudkan suasana kerja yang kondusif di Institusi Bappeda. Nilai-nilai utama tersebut terdiri dari *demokratis, profesional, transparan, komunikatif, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan saling menghormati.*

Secara lebih substantif nilai-nilai tersebut dapat dielaborasi dengan sebagai pedoman perilaku dan etika bersama yang akan dikembangkan dalam sistem hubungan kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. *Demokratis*; nilai-nilai demokratis dimaksudkan bahwa dalam perilaku kerja diutamakan agar dapat mengembangkan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam mendukung pencapaian tugas-tugas masing-masing unit.
2. *Profesional*; nilai profesional memiliki makna untuk selalu berupaya meningkatkan kemampuan teknis dan kapasitas pribadi, berdisiplin dan menjunjung etika korps pegawai negeri.
3. *Transparan*; nilai transparan memiliki makna bahwa dalam melaksanakan tugas setiap pegawai dituntut untuk dapat berlaku terbuka, jujur, dan siap memberikan maupun menerima pendapat secara positif sesuai norma dan etika yang berlaku.
4. *Komunikatif*; nilai komunikatif memiliki makna bahwa dalam melaksanakan tugas mampu berkomunikasi secara baik dan jelas kepada atasan, bawahan dan sesama pegawai serta dapat memahami substansi materi pekerjaan sehingga dapat memberikan informasi yang akurat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
5. *Kreatif*; nilai kreatif memiliki makna bahwa setiap pegawai harus mampu mengupayakan didapatnya nilai tambah dari pekerjaan yang diberikan sehingga akan memperkaya kualitas output pekerjaan yang dihasilkan.
6. *Inovatif*; nilai inovatif memiliki makna berpikir jauh ke depan dan menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna bagi peningkatan kinerja organisasi.
7. *Bertanggung jawab*; nilai bertanggung jawab memiliki makna bahwa setiap pegawai harus ada rasa memiliki (*sense*) terhadap organisasi dan mencintai pekerjaan.
8. *Saling menghormati*; nilai saling menghormati memiliki makna bahwa setiap pegawai harus saling menghargai dan saling pengertian satu sama lain.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Secara umum tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan. Secara lebih khusus tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2						
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi	Administrasi yang tertib dan berkualitas	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor yang Berkualitas	95%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatkan Dukungan Operasional	Meningkatnya Cakupan kebutuhan operasional kantor	Rasio perlengkapan kantor terhadap kebutuhan pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Perencana	Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Semakin Meningkat	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Perencanaan	40 org	100 org	1020 org	140 org	160 org
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang semakin Berkualitas	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90%	90%	90%	90%	90%
		Penjabaran Program Renstra ke Dalam Renja	90%	90%	90%	90%	90%
		Tersedianya dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
		Tersedianya Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
		Tersedianya Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada

		RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA					
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Data Daerah	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	ada
		Buku "PDRB Kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada
		Pertumbuhan PDRB	7,43%	7,81%	7,92%	7,94%	8,00%
		PDRB Per Kapita (Rp)	38.470.758,29	44.731.683,21	52.731.683,21	60.592.763,76	70.591.600,55
		Tersedianya Pusat Data	-	-	ada	ada	ada
5. Meningkatkan Koordinasi Upaya-upaya Pembangunan dengan Stakeholders lainnya	Meningkatnya Koordinasi dengan Sektor Swasta dan Komponen masyarakat lainnya	Terbentuknya Forum CSR Kabupaten Bengkalis	ada	ada	ada	ada	ada
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Fisik	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah Kajian/Perencanaan Bidang Infrastruktur	4	2	-	-	-
7. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Penataan Ruang Yang Berkualitas	Ketaatan Terhadap RTRW	65%	75%	85%	90%	95%
8. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian yang berkualitas	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah Kajian/Perencanaan Bidang Perekonomian	1	-	2	-	1

		Laju Inflasi	7,00	7,00	6,50	6,00	5,50
		Pertumbuhan Ekonomi	7,79	7,76	7,86	7,89	7,97
9. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang berkualitas	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	90%	90%	90%	90%	90%
9. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan dan Aparatur	Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencana	-	1	3	2	1

4.3. Strategi dan Kebijakan

Secara umum cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah:

- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia perencanaan Kabupaten Bengkalis;
- Menyiapkan sistem perencanaan yang baik guna mempermudah proses perencanaan dan penganggaran daerah;
- Pengamatan lapangan dan pengumpulan data;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- Bekerjasama dengan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan konsultan perencanaan;

Secara lebih rinci strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai misinya dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut.

Tabel IV.2
Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Bengkalis
Tahun 2010 – 2015

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	4	5
I. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi, Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	1.1 Administrasi yang tertib dan berkualitas	1.1.1 Peningkatan Kegiatan Administrasi yang lengkap dan berkualitas	1.1.1.1 Menyediakan kelengkapan administrasi bagi menunjang tugas-tugas kantor
	1.2 Cakupan kebutuhan operasional kantor yang semakin baik	1.2.1 Peningkatan Cakupan kebutuhan bagi Operasional tugas sehari-hari	1.2.1.1 Menyediakan kebutuhan dan kelengkapan bagi operasional kantor
2. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Perencana	3.1 Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Semakin meningkat	3.1.1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur di bidang Perencanaan	3.1.1.1 Melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis tentang Perencanaan bagi Aparatur
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	3.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang semakin berkualitas	3.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah serta Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan	3.1.1.1 Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Monitoring, Evaluasi serta Klarifikasi Usulan Pembangunan
4. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data Daerah	4.1 Ketersediaan dan Kualitas Data Daerah yang semakin baik	4.1.1 Peningkatan ketersediaan dan Kualitas Data bagi Perencanaan Pembangunan	4.1.1.1 Menyiapkan Sistem Informasi dan Database Daerah
5. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dengan Stakeholders lainnya	5.1 Terciptanya Koordinasi dengan Sektor Swasta dan Komponen masyarakat lainnya	5.1.1 Peningkatan Kooordinasi dengan Sektor Swasta dan Komponen Masyarakat lainnya	5.1.1.1 Menyiapkan format kerjasama dengan sektor swasta dan komponen pendukung lainnya
II. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur			
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang	1.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana	1.1.1.1 Menyusun berbagai kajian/perencanaan bidang Infrastruktur, melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	4	5
Pembangunan Bidang Infrastruktur	Infrastruktur yang berkualitas	Pembangunan Bidang Infrastruktur	stakeholders pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	2.1 Penataan Ruang yang Berkualitas	2.1.1 Peningkatan Koordinasi dan Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	2.1.1.1 Menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bengkalis
III. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian			
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian yang berkualitas	1.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian	1.1.1.1 Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan stakeholders pembangunan lainnya
IV. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya			
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang berkualitas	1.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	1.1.1.1 Menyusun perencanaan Sosial dan Budaya, melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan stakeholders pembangunan lainnya
V. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur			
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang berkualitas	1.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.1.1.1 Menyusun perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur, melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan stakeholders pembangunan lainnya

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkalis secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II Renstra ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SESUAI RPJMD

Indikator kinerja Bappeda sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai oleh Bappeda dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja Bappeda tersebut secara jelas dapat dilihat pada lampiran III Renstra ini.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis disusun sebagai kerangka dalam upaya pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. Dengan adanya Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis ini, diharapkan sistem dan mekanisme perencanaan yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis akan lebih terarah dan berkelanjutan serta akan lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Selain itu dengan dirumuskannya Renstra Bappeda ini, Bappeda Kabupaten Bengkalis telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang, khususnya hingga berakhir periode RPJMD dan diharapkan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi dan lingkungan baik itu internal maupun eksternal yang terjadi secara terus menerus dapat disikapi dengan arif dan bijaksana. Dengan perumusan Rencana Strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi, bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut.

Bappeda sebagai lembaga penanggung jawab dalam sistem perencanaan sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka seyogyanya seluruh aparat perencana yang bertugas di Bappeda Kabupaten Bengkalis harus lebih memahami tugas dan fungsinya, sehingga apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang tersebut dapat tercapai dengan baik dan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan lagi.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis sangat tergantung pada partisipasi, semangat, sikap dan mental serta disiplin dari segenap aparatur Bappeda mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada level terendah. Untuk itu usaha penyempurnaan Renstra akan terus dilakukan melalui evaluasi dan kendali semua kegiatan dari pelaksanaan program kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis.

Sebagai sebuah dokumen, Renstra ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pencapaian visi dan misi Bappeda Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya diharapkan tercipta suatu perencanaan pembangunan yang dapat menjawab segala permasalahan di Kabupaten Bengkalis dan menciptakan sumber daya aparatur perencanaan yang tangguh dan peka terhadap dinamika lingkungan serta perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. Lampiran I : Tabel Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**
- 2. Lampiran II : Rencana Program dan Kegiatan Lima Tahun disertai Indikasi Pendanaan**
- 3. Lampiran III : Indikator Kinerja Program Sesuai RPJMD**
- 4. Lampiran IV : Matriks Dukungan Bappeda Terhadap Misi RPJMD**
- 5. Lampiran V : Matriks Dukungan Bappeda Terhadap Grand Strategy Pengembangan Empat Kawasan**
- 6. Lampiran VI : Matriks Dukungan Bappeda Terhadap Grand Strategy Enam Jaminan Kepada Masyarakat**

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2010 - 2015

VISI : "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Integratif, Aspiratif dan Partisipatif untuk Mendukung Pencapaian Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2015"

- MISI :**
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi, Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur
 3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian
 4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KET
1	2	4	5	6	7
I. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi, Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah					
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	1.1 Administrasi yang tertib dan berkualitas	1.1.1 Peningkatan Kegiatan Administrasi yang lengkap dan berkualitas	1.1.1.1 Menyediakan kelengkapan administrasi bagi menunjang tugas-tugas kantor	1.1.1.1.1 Belanja Tidak Langsung 1.1.1.1.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1.2 Cakupan kebutuhan operasional kantor yang semakin baik	1.2.1 Peningkatan Cakupan kebutuhan bagi Operasional tugas sehari-hari	1.2.1.1 Menyediakan kebutuhan dan kelengkapan bagi operasional kantor	1.2.1.1.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.2.1.1.2 Peningkatan Disiplin Aparatur	
2. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Perencana	3.1 Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Semakin meningkat	3.1.1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur di bidang Perencanaan	3.1.1.1 Melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis tentang Perencanaan bagi Aparatur	2.1.1.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	3.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang semakin berkualitas	3.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah serta Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan	3.1.1.1 Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Monitoring, Evaluasi serta Klarifikasi Usulan Pembangunan	3.1.1.1.1 Perencanaan Pembangunan Daerah	
4. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data Daerah	4.1 Ketersediaan dan Kualitas Data Daerah yang semakin baik	4.1.1 Peningkatan ketersediaan dan Kualitas Data bagi Perencanaan Pembangunan	4.1.1.1 Menyiapkan Sistem Informasi dan Database Daerah	4.1.1.1.1 Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KET
1	2	4	5	6	7
5. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dengan Stakeholders lainnya	5.1 Terciptanya Koordinasi dengan Sektor Swasta dan Komponen masyarakat lainnya	5.1.1 Peningkatan Kooordinasi dengan Sektor Swasta dan Komponen Masyarakat lainnya	5.1.1.1 Menyiapkan format kerjasama dengan sektor swasta dan komponen pendukung lainnya	5.1.1.1.1 Kerjasama Pembangunan	
II. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur					
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur yang berkualitas	1.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur	1.1.1.1 Menyusun berbagai kajian/perencanaan bidang Infrastruktur, melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan stakeholders pembangunan	1.1.1.1.1 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.1.1.1.2 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.1.1.1.3 Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	
2. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	2.1 Penataan Ruang yang Berkualitas	2.1.1 Peningkatan Koordinasi dan Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	2.1.1.1 Menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bengkalis	2.1.1.1.1 Perencanaan Tata Ruang	
III. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian					
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian yang berkualitas	1.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian	1.1.1.1 Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan stakeholders pembangunan lainnya	1.1.1.1.1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
IV. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya					
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang berkualitas	1.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	1.1.1.1 Menyusun perencanaan Sosial dan Budaya, melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan stakeholders pembangunan lainnya	1.1.1.1.1 Perencanaan Sosial dan Budaya	
V. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur					
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan,	1.1 Perencanaan, Monitoring dan	1.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan,	1.1.1.1 Menyusun perencanaan bidang	1.1.1.1.1 Peningkatan Kapasitas	

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KET
1	2	4	5	6	7
Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang berkualitas	Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	pemerintahan dan aparatur, melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan stakeholders pembangunan lainnya	Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.1.1.1.2 Perencanaan Sosial dan Budaya 1.1.1.1.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN : BENGKALIS

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
I. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi, Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah																							
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi	1.1 Administrasi yang tertib dan berkualitas	1.1.1 Terlaksananya kegiatan administrasi kantor yang berkualitas	5 2	1. Belanja Tidak Langsung		7,188,547,009.69																	
				0 1	2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,336,195,400.00																
				0 1	1. Penyediaan jasa surat menyurat	1. Terlaksananya jasa surat menyurat	100%	122,700,000.00	100%	80,700,000.00	88,770,000.00	97,647,000.00	107,411,700.00	100%	497,228,700.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				0 2	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2. Terwujudnya kelancaran jasa telekomunikasi, air dan listrik	100%	118,200,000.00	100%	135,600,000.00	149,160,000.00	164,076,000.00	180,483,600.00	100%	747,519,600.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				0 3	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3. Tersedianya perlengkapan kantor	100%	15,000,000.00	100%	43,250,000.00	47,575,000.00	52,332,500.00	57,565,750.00	100%	215,723,250.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				0 8	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	4. Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	100%	149,025,700.00	100%	198,322,827.00	218,155,109.70	239,970,620.67	263,967,682.74	100%	1,069,441,940.11	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				1 0	5. Penyediaan alat tulis kantor	5. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	275,000,000.00	100%	649,508,469.00	714,459,315.90	785,905,247.49	864,495,772.24	100%	3,289,368,804.63	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				1 1	6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	6. Terwujudnya kelancaran administrasi tugas	100%	99,840,500.00	100%	126,505,223.00	139,155,745.30	153,071,319.83	168,378,451.81	100%	686,951,239.94	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				1 2	7. Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	66,514,900.00	100%	67,176,810.00	73,894,491.00	81,283,940.10	89,412,334.11	100%	378,282,475.21	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				1 5	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8. Meningkatnya minat baca dan pengetahuan pegawai	100%	50,200,000.00	100%	25,200,000.00	27,720,000.00	30,492,000.00	33,541,200.00	100%	167,153,200.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				1 7	9. Penyediaan makanan dan minuman	9. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pegawai	100%	383,520,000.00	100%	168,400,000.00	185,240,000.00	203,764,000.00	224,140,400.00	100%	1,165,064,400.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				1 8	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan	100%	1,326,120,000.00	100%	1,269,215,000.00	1,396,136,500.00	1,535,750,150.00	1,689,325,165.00	100%	7,216,546,815.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						
		11. Penyediaan Pengadaan jasa keamanan kantor, kebersihan dan supir kantor		-	-	-	100%	216,000,000.00	-	-	100%	216,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkalis									
		12. Penyediaan jasa keamanan kantor		100%	108,000,000.00	100%	90,000,000.00	99,000,000.00	108,900,000.00	119,790,000.00	100%	525,690,000.00	Bappeda	Kab. Bengkalis									
2. Meningkatkan Dukungan Operasional Kantor	2.1 Cakupan Kebutuhan Operasional Kantor yang semakin baik	2.1.1 Terciptanya dukungan operasional kantor yang lebih berkualitas	0 2	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,095,241,800.00																	
				0 5	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	-	0	610,000,000.00	522,000,000.00	0	0	1,132,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkalis								
				0 7	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2. Tersedianya kelengkapan gedung kantor	100%	174,500,000.00	-	0	0	0	174,500,000.00	Bappeda	Kab. Bengkalis								
				0 9	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	3. Tersedianya kelengkapan peralatan gedung kantor	100%	713,420,200.00	100%	574,943,800.00	632,438,180.00	695,681,998.00	765,250,197.80	100%	3,381,734,375.80	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				2 2	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4. Terciptanya keindahan gedung kantor	100%	180,649,800.00	100%	171,847,174.00	189,031,891.40	207,935,080.54	228,728,588.59	100%	978,192,534.53	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				2 4	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	199,500,000.00	100%	194,750,000.00	214,225,000.00	235,647,500.00	259,212,250.00	100%	1,103,334,750.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				2 8	6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6. Terciptanya kenyamanan kerja	100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	275,000,000.00	302,500,000.00	332,750,000.00	100%	1,410,250,000.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						
				5 5	7. Pembangunan fasilitas gedung kantor	7. Terwujudnya fasilitas gedung kantor	100%	615,008,700.00	-	0	-	0	-	0	100%	615,008,700.00	Bappeda	Kab. Bengkalis					
				5 7	8. Sewa, operasional dan perawatan mesin foto copy	8. Terciptanya kenyamanan kerja	100%	125,000,000.00	-	0	-	0	-	0	100%	125,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkalis					
				6 1	9. Rehab ruang kearsipan/aset	9. Terciptanya kenyamanan kerja	100%	98,767,500.00	-	0	-	0	-	0	100%	98,767,500.00	Bappeda	Kab. Bengkalis					
				1 0	10. Pengadaan mebeleur	10. Tersedianya mebeleur yang lengkap	-	0	100%	272,362,900.00	-	0	-	0	100%	272,362,900.00	Bappeda	Kab. Bengkalis					
				4 2	11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	11. Terciptanya kenyamanan kerja	-	0	100%	3,111,708,416.00	-	0	-	0	100%	3,111,708,416.00	Bappeda	Kab. Bengkalis					
						12. Pengerjaan Desain Interior Kantor Bappeda		-	0	-	0	100%	400,000,000.00	-	0	-	0	100%	400,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkalis		
		13. Pembangunan Pagar Kantor Bappeda		-	0	-	0	100%	500,000,000.00	-	0	-	0	100%	500,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkalis						

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			03	14. Penataan Taman dan Lingkungan Kantor Bappeda (landscape) 15. Pembangunan Ruang Multimedia Bappeda 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 2. Pengadaan Pakaian Melayu 3. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya	14. Tertatanya Lingkungan Kantor yang indah, nyaman dan asri 15. Tersedianya ruangan multimedia untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda 1. Tersedianya pakaian kerja 2. Tersedianya pakaian seragam melayu untuk pegawai lingkungan Bappeda 3. Tersedianya perlengkapan pakaian dinas bagi PNS	-	0	-	0	100%	300,000,000.00	-	0	-	0	100%	300,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu	
			03			-	0	-	0	100%	450,000,000.00	-	0	-	0	100%	450,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu	
			03			100%	20,000,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	20,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu	
			03			-	0	100%	89,000,000.00	-	0	-	0	-	0	100%	89,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu	
			03			-	0	-	0	100%	63,200,000.00	-	0	-	0	100%	63,200,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu	
3. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Perencana	3.1 Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Semakin Meningkat	3.1.1 Meningkatnya jumlah aparatur perencana yang lebih profesional dan berkualitas		5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah		100%	543,200,000.00	100%	543,200,000.00	-	543,200,000.00	-	543,200,000.00	-	543,200,000.00	100%	2,716,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	4.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang semakin berkualitas	4.1.1 Penjabaran Program RPJMD kedalam RPKD 4.1.2 Tersedianya dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 4.1.3 Tersedianya Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 4.1.4 Tersedianya Dokumen RPKD yg telah ditetapkan dgn PERKADA		6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan rancangan RPKD 2. Penyelenggaraan musrenbang RPKD 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Hunting data rencana kegiatan tahunan 5. Sosialisasi RPJMD 6. Revisi RPJMD 7. Evaluasi RPJMD 8. Penyusunan RPJMD Kab. Bengkulu Tahun 2015-2020 9. Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan 10. Penyusunan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 11. Pertimbangan dan kajian kebijakan Bupati Bengkulu 12. Pembuatan website perencanaan pembangunan daerah 13. Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu 14. Evaluasi Program Penguatan Infrastruktur Desa dan Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan 15. Evaluasi Program UED-SP Kabupaten Bengkulu 16. Revisi RPJPD Kabupaten Bengkulu 17. Rapat Evaluasi Grand Strategy Empat Kawasan dan Enam Jaminan di Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu	4,494,072,725.00	100%	208,160,200.00	100%	204,529,757.00	100%	205,000,000.00	100%	210,000,000.00	100%	215,000,000.00	100%	1,042,689,957.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							100%	678,577,800.00	100%	594,504,540.00	100%	680,000,000.00	100%	680,000,000.00	100%	680,000,000.00	100%	3,313,082,340.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							100%	449,004,400.00	100%	564,514,990.00	100%	600,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	2,813,519,390.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							100%	1,191,253,650.00	100%	0	-	0	-	0	-	0	100%	1,191,253,650.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							100%	392,226,100.00	100%	397,563,974.00	-	0	-	0	-	0	100%	789,790,074.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	100%	125,000,000.00	-	0	-	0	-	0	100%	125,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	-	0	100%	350,000,000.00	-	0	100%	350,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	-	0	-	0	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	100%	289,659,665.00	100%	300,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	1,314,659,665.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	100%	108,025,087.00	-	0	-	0	-	0	100%	108,025,087.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	100%	776,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	3,226,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	100%	172,100,305.00	-	0	-	0	-	0	100%	172,100,305.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	100%	600,000,000.00	-	0	-	0	100%	600,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	-	0	100%	500,000,000.00	-	0	100%	500,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	100%	500,000,000.00	-	0	-	0	100%	500,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	100%	450,000,000.00	-	0	-	0	100%	450,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	100%	450,000,000.00	-	0	-	0	100%	450,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				18. Penyusunan Profil Daerah	18. Tersedianya Dokumen Dokumen Profil Daerah Kabupaten Bengkulu		-	0	100%	160,000,000.00	-	-	-	0	-	0	100%	160,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
5. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data Daerah	5.1 Ketersediaan dan Kualitas Data Daerah semakin baik	5.1.1 Buku Kabupaten dalam Angka 5.1.2 Buku PDRB Kabupaten, Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita 5.1.4 Tersedianya Pusat Data	1 5 0 5 0 8	7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1. Tersedianya data yang dapat dipergunakan dalam perencanaan 2. Tersedianya Pusat Data Pembangunan Daerah yg Update	549,060,650.00	100%	553,811,200.00	100%	597,554,728.00	100%	630,000,000.00	100%	650,000,000.00	100%	650,000,000.00	100%	3,081,365,928.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
5. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dengan Stakeholders lainnya	5.1 Terciptanya Koordinasi dengan Sektor Swasta dan Komponen masyarakat lainnya	5.1.1 Terbentuknya Forum CSR Kabupaten Bengkulu	1 6	8. Program Kerjasama Pembangunan	1. Forum koordinasi implementasi program <i>corporate social responsibility</i> 2. Workshop, rapat koordinasi dan rapat evaluasi Forum Koordinasi Implementasi Program <i>Corporate Social Responsibility</i>		100%	249,783,200.00	-	0	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100%	999,783,200.00	Bappeda	Kab. Bengkulu			
II. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur																				
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur yang berkualitas	1.1.1 Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Fisik 1.1.1 Jumlah Kajian/Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 4 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 1 8 0 6	9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik yang komprehensif dan akurat 2. Masterplan Kota Duri, Kecamatan Mandau dan Pinggir 3. Penyusunan Feasibility Study (FS) Bandar Udara 4. Review Feasibility Study (FS) pembangunan bandar udara dipulau Bengkulu 5. Masterplan Kota Bengkulu, Kecamatan Bengkulu dan Bantan 6. Masterplan Kota Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil 7. Masterplan Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara 8. Koordinasi Perencanaan penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan (AMPL) Kabupaten Bengkulu 9. International Coordinating Council of Man And Biosphere	2,496,688,930.00	100%	269,878,300.00	100%	334,135,998.00	100%	434,376,797.40	100%	499,533,317.01	100%	549,486,648.71	100%	2,087,411,061.12	Bappeda	Kab. Bengkulu
							100%	1,689,289,100.00	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	1,689,289,100.00	Bappeda	Kec. Mandau dan Pinggir
							100%	904,651,800.00	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	904,651,800.00	Bappeda	Kec. Rupat Utara
							100%	882,218,700.00	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	882,218,700.00	Bappeda	Kec. Bengkulu dan Bantan
							100%	890,501,500.00	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	890,501,500.00	Bappeda	Kec. Bukit batu dan Siak Kecil
							-	0	100%	852,734,986.00	-	0	-	0	-	0	100%	852,734,986.00	Bappeda	Kec. Rupat dan Rupat Utara
							-	0	100%	870,974,986.00	-	0	-	0	-	0	100%	870,974,986.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	100%	200,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	253,000,000.00	100%	683,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							-	0	-	0	100%	400,000,000.00	-	0	-	0	100%	400,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
							253,226,100.00	100%	195,270,300.00	100%	191,142,520.00	0	0	0	0	0	100%	386,412,820.00	Bappeda	Kab. Bengkulu

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Sosialisasi tingkat kabupaten program RIS PNPMD (Rural Infrastruktur Support - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan PNPMD Mandiri Perkotaan	2. Meningkatnya pemahaman pelaksanaan program RIS-PNPMD dan PNPMD Mandiri Perkotaan bagi Aparat Desa/Kelurahan		100%	501,143,500.00	100%	215,605,645.00	100%	280,287,338.50	100%	322,330,439.28	100%	354,563,483.20	100%	1,673,930,405.98	Bappeda	Kab. Bengkulu
			1 5	11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah																
			0 8	1. Pemutakhiran data jaringan Jalan dan jembatan	2. Terwujudnya data jaringan jalan dan jembatan di Kecamatan Mandau		100%	520,942,800.00	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	520,942,800.00	Bappeda	Kec. Mandau
2. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	2.1 Penataan Ruang yang Berkualitas	2.1.1 Ketaatan Terhadap RTRW	1 5	12. Program Perencanaan Tata Ruang		-														
			1 4	1. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota	1. Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu		100%	308,383,000.00	-	0		0	0	0	100%	308,383,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu		
				2. Sosialisasi RTRW Kabupaten Bengkulu	2. Tersosialisasinya RTRW Kabupaten Bengkulu Ke Seluruh Masyarakat			0	0	100%	250,000,000.00	100%	287,500,000.00	100%	316,250,000.00	100%	853,750,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu	
				3. Koordinasi Perencanaan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Bidang Keciaptakarya				0	0	100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	750,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu	
III. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian																				
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian yang Berkualitas	1.1.1 Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian	2 2	13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		2,586,504,700.00														
		1.1.2 Jumlah Kajian/Perencanaan Bidang Perekonomian	0 2	1. Penyusunan indikator ekonomi daerah	1. Tersusunnya data indikator capaian pembangunan ekonomi kabupaten Bengkulu		100%	422,925,000.00	100%	433,146,463.00	100%	450,000,000.00	100%	433,146,463.00	100%	450,000,000.00	100%	2,189,217,926.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
		1.1.3 Laju Inflasi	3 2	2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian	2. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan		100%	289,871,000.00	100%	289,647,049.00	100%	300,000,000.00	100%	289,647,049.00	100%	300,000,000.00	100%	1,469,165,098.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
		1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	3 3	3. Penyusunan Indikator Input Output (IO) Kabupaten Bengkulu	3. Tersusunnya data indikator capaian Input Output (IO) kabupaten Bengkulu		-	-	-	0	100%	450,000,000.00	-	0	-	0	100%	450,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
				4. Feasibility Study (FS) kawasan industri dan pelabuhan Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu	4. Terwujudnya perencanaan FS yang komprehensif		100%	749,937,500.00	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	749,937,500.00	Bappeda	Kec. Bukit Batu
				5. Penyusunan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kabupaten Bengkulu	5. Tersusunnya data Indeks Kemiskinan Kabupaten Bengkulu 1 Kabupaten		-	0	-	0	100%	450,000,000.00	-	0	-	0	100%	450,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
				6. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu	6. Tersusunnya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu		-	0	-	0	-	-	-	0	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
				7. Evaluasi Bidang Pertanian	7. Terlaksananya Evaluasi Bidang Pertanian dan Peternakan		-	0	-	0	100%	350,000,000.00	-	0	-	0	100%	350,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
				8. Evaluasi Bidang Usaha Perekonomian dan Energi	7. Terlaksananya Evaluasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan		-	0	-	0	100%	350,000,000.00	-	0	-	0	100%	350,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
IV. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya																				
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian yang Berkualitas	1.1.1 Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	2 3	14. Program Perencanaan Sosial dan Budaya		1,033,402,800.00														
			0 5	1. Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya	1. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan		100%	273,354,000.00	100%	383,357,418.00	100%	485,000,000.00	100%	580,000,000.00	100%	620,000,000.00	100%	2,341,711,418.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
			2 4	2. Evaluasi program pada bidang sosial dan budaya	2. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di lingkup kerja bidang sosial Budaya			0	0	100%	525,000,000.00	0	100%	550,000,000.00	1,075,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu			

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bengkulu	3. Terselenggaranya program dan kegiatan penurunan kemiskinan daerah Bengkulu			0			100%	450,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	525,000,000.00	100%	1,475,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
V. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur																				
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Berkualitas	1.1.1 Penjabaran Program Renstra ke dalam Renja SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1.1.2 Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencana	2	0	15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,031,036,600.00														
				0 4	1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur		100%	266,260,000.00	100%	314,776,606.00	-	350,000,000.00	-	375,000,000.00	-	400,000,000.00	100%	1,706,036,606.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
				0 1	2. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana		-	0	100%	229,236,476.00	-	720,000,000.00	-	600,000,000.00	-	550,000,000.00	100%	2,099,236,476.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
					3. Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana		-	0	-	-	100%	300,000,000.00	100%	350,000,000.00	-	0	100%	650,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
					4. Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Renja dan RKPD		-	0	-	-	100%	275,000,000.00	-	0	-	-	100%	275,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
			2	3	16. Program Perencanaan Sosial dan Budaya															
					1. Persiapan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Kab. Bengkulu		-	0	100%	163,361,901.00	-	0	-	0	-	0	100%	163,361,901.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
					2. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Bengkulu		-	0	-	0	100%	250,000,000.00	-	0	-	0	100%	250,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
					3. Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Bengkulu		-	0	-	0	-	0	100%	275,000,000.00	-	0	100%	275,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
					4. Pengawasan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Bengkulu		-	0	-	0	-	0	-	0	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	Bappeda	Kab. Bengkulu
			0	5	17. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
				4	1. Bimtek Permendagri No. 54 Tahun 2010				100%	269,917,653.00	-	0	-	0	-	0	100%	269,917,653.00	Bappeda	Kab. Bengkulu

MATRIKS INDIKATOR KINERJA PROGRAM BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 - 2015
SESUAI RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 - 2015

NO	MISI/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	MISI KEEMPAT RPJMD KABUPATEN BENGKALIS : <i>Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.</i>								
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	65.00
	MISI KELIMA RPJMD KABUPATEN BENGKALIS : <i>Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).</i>								
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
5.	Pertumbuhan PDRB	%	7.21	7.43	7.81	7.92	7.94	8.00	8.00
6.	Laju inflasi	%	7.50	7.00	7.00	6.50	6.00	5.50	5.50
7.	PDRB per kapita	Rupiah	33,105,906.01	38,470,758.29	44,731,683.21	52,044,747.27	60,592,763.76	70,591,600.55	70,591,600.55
8.	Pertumbuhan ekonomi	%	7.63	7.79	7.76	7.86	7.89	7.97	7.97
9.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

MATRIKS DUKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP MISI RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 - 2015

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas
IV.	MISI IV :						
	Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.						
IV.4	Meningkatkan penataan ruang	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Ketaatan terhadap RTRW	%	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	1. Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis	1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2. Program Perencanaan Tata Ruang
V.	MISI V :						
	Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).						
V.1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Kualitas Administrasi dilihat dari sistem pencatatan dan pelaporan 2. Rasio perlengkapan kantor terhadap kebutuhan pekerjaan 3. Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Perencanaan	Ada / Tidak Orang Orang Orang Orang	1. Peningkatan kegiatan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintah daerah 2. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur	1. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah 2. Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
V.2	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 5. Pertumbuhan PDRB 6. Laju inflasi 7. PDRB per kapita 8. Pertumbuhan ekonomi	Ada / Tidak Ada / Tidak Ada / Tidak % % Rupiah %	1. Peningkatan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD	5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 11. Program Kerjasama Pembangunan
V.3	Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi	4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah	1. Buku "kabupaten dalam angka" 2. Buku "PDRB kabupaten"	Ada / Tidak Ada / Tidak	1. Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	1. Menyiapkan sistem informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik	12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

MATRIKS DUKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP GRAND STRATEGY PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN

NO.	KAWASAN / TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
I.	KAWASAN I				
	PUSAT PENDIDIKAN DAN AGRIBISNIS DI PULAU BENGKALIS				
I.1	TUJUAN				
	Menjadikan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai salah satu Pusat Pendidikan di Sumatera serta sebagai kawasan Agribisnis.				
I.2	SASARAN				
I.2.1	Terwujudnya Pulau Bengkalis sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada pusat pendidikan dan kawasan agribisnis.	1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.	1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.	1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	1. Penyusunan Masterplan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan 2. Review FS Bandara Pulau Bengkalis
II.	KAWASAN II				
	PUSAT INDUSTRI, PELABUHAN DAN AGROBISNIS DI KECAMATAN BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL				
II.1	TUJUAN				
	Menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri dan Agribisnis				
II.2	SASARAN				
II.2.1	Terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.	1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.	1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.	1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	1. Penyusunan Masterplan Kota Sei Pakning, Kota Lubuk Muda, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil. 2. Feasibility Study Kawasan Industri dan Pelabuhan Buruk Bakul

NO.	KAWASAN / TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
III	KAWASAN III				
	PUSAT PARIWISATA DAN AGROBISNIS DI PULAU RUPAT				
III.1	TUJUAN				
	Menjadikan Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara sebagai Kawasan Pariwisata dengan didukung oleh Agrobisnis				
III.2	SASARAN				
III.2.1	Terwujudnya Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan pariwisata dan kawasan agribisnis.	1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Rupert dan Rupert Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.	1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupert dan Rupert Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.	1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	1. Penyusunan Feasibility Study Bandara Pulau Rupert 2. Penyusunan Masterplan Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.
IV.	KAWASAN IV				
	KOTA TRANSIT DAN PETROPOLIS DI KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN PINGGIR				
IV.1	TUJUAN				
	Menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis				
IV.2	SASARAN				
IV.2.1	Terwujudnya Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada Kota Transit dan Petropolis.	1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.	1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.	1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	1. Penyusunan Masterplan Kota Duri, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir

MATRIKS DUKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP GRAND STRATEGY ENAM JAMINAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	JAMINAN / TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
IV	JAMINAN IV				
	JAMINAN AKSES INFRASTRUKTUR DASAR				
	IV.1	TUJUAN			
		MENJAMIN TERSEDIAANYA INFRASTRUKTUR DASAR BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN			
IV.2	SASARAN				
IV.2.1	Terpenuhinya akses koneksitas inter dan antar kawasan	1. Pembangunan jalan penghubung inter dan antar kawasan	1. Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupat Utara	1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	1. Penyusunan review FS Bandara di Pulau Bengkalis 2. Penyusunan FS Bandara di Pulau Rupat
		2. Pembangunan dan pengembangan akses perhubungan	1. Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair	1. Program perencanaan pembangunan ekonomi	1. Penyusunan FS Kawasan Industri Buruk Bakul 2. Pembangunan Pelabuhan Roro Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) - Pulau Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti)
V.	JAMINAN V				
	JAMINAN PELAYANAN PUBLIK, BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN DAERAH				
	V.1	TUJUAN			
		MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN			

NO.	JAMINAN / TUJUAN / SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
V.2	SASARAN				
V.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Profesional	1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1. Pemberian insentif kinerja dan prestasi kerja
VI	JAMINAN VI				
	JAMINAN PEMERATAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH				
VI.1	TUJUAN				
	MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH				
VI.2	SASARAN				
VI.2.1	Terarahnya Pembangunan sesuai potensi dan kekhususan setiap wilayah	1. Menyiapkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan aspiratif	1. Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten
			2. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya	1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1. Menyusun Masterplan dan DED untuk kegiatan-kegiatan Strategis

